

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah daerah saat ini dihadapkan oleh banyak tuntutan baik dari segi internal yaitu peningkatan kerja yang optimal dan segi eksternal yaitu tuntutan masyarakat yang menghendaki agar pemerintah daerah mampu menciptakan tujuan masyarakat daerah yang sejahtera sebagai suatu implikasi dari penerapan otonomdaerah yang mengedepankan akuntabilitas kinerja dan peningkatan pelayanan publik (Halim,2007)

Perubahan sistem anggaran yang dilakukan sebagai langkah reformasi keuangan daerah dengan mengubah sistem penganggaran yang dimana dulunya penganggaran berbasis tradisional diubah menjadi penganggaraan berbasis kinerja. Pada anggaran berbasis tradisional kinerja anggaran diukur dari sisi inputnya yakni dilihat dari kemampuannya menyerap anggaran dan apa bila anggaran yang diberikan tidak diserap seluruhnya (sisa anggaran) maka harus dikembalikan lagi ke rekening kas Negara dan dinilai kurang berhasil,namun dengan digunakannya anggaran berbasis kinerja pemerintah tidak fokus dari sisi inputnya yaitu habis tidak anggaran yang diberikan melainkan pemerintah lebih berorientasi pada hasil kerja output dan outcome anggaran.

Kinerja pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/kebijakan dalm mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategi suatu

organisasi. Secara umum juga dapat dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai organisasi dalam periode tertentu.

Negara lain juga ada yang menerapkan anggaran berbasis kinerja yang salah satunya adalah Australia. Hal ini merupakan contoh bagi kita untuk menerapkan sistem Anggaran Berbasis Kinerja di Negara kita. Memang belum semua instansi yang menggunakan sistem Anggaran Berbasis Kinerja dan menggunakan sistem anggaran berbasis tradisional. Penetapan anggaran untuk program dan kegiatan masih didasari dengan besar atau tidak item belanja pada anggaran tahun sebelumnya. Hal ini akan berdampak pada alokasi dana yang tidak efektif dan efisien karena tidak didasarkan pada pencapaian kinerja dari program dan kegiatannya sehingga terkesan seperti ada yang menyimpang dari penggunaan anggaran.

Anggaran merupakan rencana keuangan yang menjadi dasar dalam pelayanan publik. Di Indonesia, dokumen anggaran daerah disebut Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Lingkup APBD menjadi penting di lingkungan pemerintah daerah. Hal ini terkait dengan dampak APBD terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Anggaran juga digunakan bagi pemerintah untuk mengestimasi kinerja yang ingin dicapai nantinya. Dengan dikeluarkannya Undang-undang No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara pasal 19 ayat (1) dan (2) yang berbunyi dalam rangka penyusunan RAPBD (Rencana Anggaran Dan Pendapatan Dan Belanja Daerah), SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)

selaku pengguna anggaran menyusun RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) dengan pendekatan berdasarkan prestasikerja yang akan dicapai.

Analisis kinerja Anggaran Dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sangat penting karena merupakan suatu metode atau alat yang digunakan untuk mencatat dan menilai pencapaian pelaksanaan kegiatan berdasarakan tujuan, sasaran, dan strategi sehingga dapat diketahui kemajuan organisasi serta tingkat efektivitas dan efisiensi anggaran.

Analisis anggaran berbasis kinerja merupakan anggaran yang menekankan pada prestasi kinerja atau hasil. Menurut Bastian (2006:171) anggaran berbasis kinerja adalah sistim penganggaran yang berorientasi pada output organisasi yang berkaitan sangat erat dengan visi dan misi serta perencanaan strategi organisasi. Sistim penganggaran ini mengaitkan langsung output dan outcome yang ingin dicapai yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan (Silistyo,2010). Anggaran berbasis kinerja diharapkan dapat memperbaiki taraf kehidupan masyarkat, meningkatkan efektivitas pembangunan dan memperbaiki tata kelola keungan dan pemerintahan yang lebih baik.

Belanja daerah didefenisikan sebagai kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang kekayaan bersih. Istilah belanja terdapat dalam laporan realisasi anggaran, karena dalam penyusunan laporan realisasi anggaran masih menggunakan basis kas. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu Organisasi Perangkat Daerah yang membantu Pemerintah Nusa Tenggara Timur dalam bidang perencanaan penyelenggaraan pemerintah daerah yang melaksanakan tugas mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Dengan adanya Analisis Anggaran Berbasis Kinerja, Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur saat ini juga menggunakan analisis Anggaran Berbasis Kinerja sebagai suatu pendekatan dalam penyusunan anggaran yang pada dasarnya dilihat dari kinerja dan hasil yang ingin dicapai dalam melaksanakan kegiatan. Berikut ini adalah data ringkasan target dan realisasi belanja APBD yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur :

Tabel 1.1
Ringkasan Target dan Realisasi Belanja APBD
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017- 2019

URAIAN	Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019		
	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Total Belanja	11.936.141.000	11.233.622.919	94,11	11.467.827.000	10.762.174.474	93,85	11.770.283.000	11.189.433.491	95,07
Belanja Tidak Langsung	7.027.221.000	6.630.005.591	94,35	6.832.614.000	6.354.440.235	93,00	7.266.932.000	6.896.826.703	94,91
Gaji dan Tunjangan	5.425.570.375	5.067.890.091	94,35	5.205.016.500	4.887.723.235	93,71	5.305.380.000	4.945.244.153	93,21
Tambahan penghasilan PNS	1.601.650.625	1.562.115.500	93,31	1.627.597.500	1.476.717.000	90,73	1.961.552.000	1.951.582.550	99,49
Belanja Langsung	4.908.920.000	4.603.617.328	93,78	4.635.213.000	4.407.734.239	95,09	4.503.351.000	4.292.606.788	95,32
Belanja Langsung Rutin SKPD	-	-		977.932.152	942.439.656	96,37	1.540.341.500	1.479.167.682	96,03

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Tabel 1.1 mengenai Laporan Target dan Realisasi Belanja APBD Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Terlihat bahwa belanja pada tahun 2017 sebesar 94,11 % , tahun 2018 sebesar 93,85%, dan pada tahun 2019 sebesar 95,07 %. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa terjadi fluktuasi anggaran dari tahun 2017-2019.

Berdasarkan uraian diatas fenomena dan permasalahan yang terjadi adalah penggunaan alokasi anggaran yang tidak terealisasi secara optimal sesuai dengan rencana alokasi anggaran yang telah direncanakan sebelumnya.

Tabel 1.2
Capaian Anggaran Dan Realissasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Tahun Anggaran 2017-2019

no	Kegiatan	Anggaran 2017 (Rp)	Realisasi 2017 (Rp)	Anggaran 2018 (Rp)	Realisasi 2018 (Rp)	Anggran 2019 (Rp)	Realisasi 2019 (Rp)	Sumber data
1	Program pelayanan administrasi	1.015.093.487	994.604.981	848.560.152	813.110.118	1.183.091.500	1.123.613.682	APBD
2	Program peningkatan sarana prasarana aparatur	414.595.913	413.995.984	88.284.000	88.247.538	322.250.000	320.565.548	APBD
3	Program peningkatan capaian kinerja	36.000.000	35.982.000	-	-	35.000.000	34.988.000	APBD
4	Program peningkatan promosi dan kerja sama investasi	1.024.287.500	911.924.243	1.986.246.288	1.893.934.773	-	-	APBD
5	Program peningkatan investasi daerah	1.444.879.100	1.361.297.820	728.746.560	673.755.260	2.963.009.500	2.813.439.558	APBD
6	Program peningkatan kualitas perizinan	654.262.000	589.231.900	664.460.000	637.388.600	-	-	APBD
7	Program pengembangan data dan informasi perizinan investasi	-	-	277.828.000	260.215.950	-	-	APBD
	Jumlah	3.935.510.262	4.307.036.928	4.594.125.000	4.366.652.239	4.503.351.000	4.292.606.788	APBD

Sumber: LAKIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Tabel 1.2 mengenai Capaian Anggaran dan Realisasi Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT. Terlihat bahwa capaian kinerja program yang dituangkan dalam LAKIP tidak semua program terlaksana oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selama tiga tahun terakhir. Berdasarkan perhitungan kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT yang dilakukan dengan cara mentotalkan jumlah realisasi anggaran dari setiap program, menunjukkan capaian kinerja pada tahun 2017 yaitu Rp. 4.307.036.928, pada tahun 2018 yaitu Rp. 4.366.652.239, pada tahun 2019 yaitu Rp. 4.292.606.788.

Berdasarkan uraian diatas maka fenomena dan permasalahan diatas dapat diidentifikasi bahwa beberapa program kegiatan belum semuanya berjalan lancar dan penerapan anggaran berbasis kinerja masih belum berjalan dengan optimal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT dengan rincian data diatas bahwa realisasi anggaran belum 100 % mencapai target yang telah direncanakan.

Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan penerapan anggaran berbasis kinerja yang dinyatakan dalam Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 yang diubah lagi menjadi Pemendagri No. 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Keuangan Daerah. Dalam peraturan disebutkan tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD).

Adanya RKA-SKPD ini diharapkan untuk bisa memenuhi kebutuhan tentang anggaran berbasis kinerja dan efektivitas anggaran, dimana anggaran berbasisi kinerja menuntut adanya output optimal atau pengeluaran yang dialokasikan sehingga setiap pengeluaran harus berorientasi atau bersifat ekonomi, efisien, efektif didalam pelaksanaannya dan mencapai suatu hasil (*outcome*). Kemudian melakukan penerapan anggaran berbasis kinerja tersebut, instansi dituntut untuk membuat kinerja pada setiap anggaran kegiatan sehingga jelas tindakan apa yang dilakukan, beberapa biaya yang dibutuhkan, dan berupa hasil yang diperoleh (fokus pada hasil).

Fenomena-fenomena diatas mengindikasikan bahwa efektivitas di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu diduga masih belum optimal hal ini diindikasikan karena anggaran berbasis kinerja yang diduga masih belum diterapkan dengan baik karena faktor terjadinya fluktuasi atau ketidakstabilan target dan realisasi di setiap tahunnya, tidak tercapainya target anggaran yang telah direncanakan selama 3 tahun terakhir, realisasi selalu lebih rendah dari target anggaran yang direncanakan, serta program dan kegiatan tidak semuanya dijalankan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan diatas, peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019**”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini yakni :

1. Bagaimana implementasi anggaran berbasis kinerja dalam program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019?
2. Faktor-faktor apakah yang mempengaruhi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi anggaran berbasis kinerja pada pelepasnaan program kegiatan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan Anggaran Berbasis Kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017-2019.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Peneliti

Dengan penelitian ini diharapkan dapat memperluas pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penerapan anggaran berbasis kinerja

2. Bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Hasil Penelitian ini dapat juga menjadi masukan bagi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menerapkan anggaran berbasis kinerja dengan baik.

3. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peneliti selanjutnya mengenai penerapan anggaran berbasis kinerja.